

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek, yakni kualitas dan kuantitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Adapun kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental), sehingga untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan dibidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu prasyarat utama.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif; yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan kata lain, bahwa

manusia merupakan makhluk yang dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Untuk menunjang potensi itu, maka pendidikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan potensi manusia agar terus berkembang dan menciptakan manusia-manusia yang unggul.

Pendidikan secara umum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan keterampilan (psikomotor). Hal ini sejalan dengan pendapat Suparna (2005: 3) yang mengemukakan bahwa pada umumnya pendidikan memberi tekanan materi pada aspek kognitif, sebagian memberi tekanan pada aspek afektif, sebagian besar memberi tekanan pada aspek keterampilan (psikomotor).

Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas SDM, yaitu melalui kegiatan penelitian, lokakarya, seminar, dan lain-lain. Selain itu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pelatihan atau diklat. Pada saat ini banyak terdapat pelatihan-pelatihan/diklat yang diselenggarakan ataupun dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, LSM, perorangan, ataupun lembaga diklat khusus.

Dengan sifat materi pada aspek-aspek yang disebutkan dalam pengertian pendidikan di atas, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek keterampilan (psikomotor); maka untuk menunjang ketiga aspek tersebut agar terpenuhi secara bersamaan, layanan pendidikan program

kelembagaan juga pada umumnya berupa pelatihan-pelatihan. Selanjutnya Suparna (2005: 3) mengemukakan pula bahwa:

Pelatihan merupakan suatu program pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga pendidikan yang khusus untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dasar, pengetahuan, dan keterampilan individu sesuai dengan misi lembaga penyelenggara dan hasil analisis pakar.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik dan terarah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi ataupun tindak lanjut. Perencanaan yang baik (matang) akan berdampak pada pelaksanaan dan hasil evaluasi yang baik pula.

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal dari fungsi perencanaan dalam manajemen pelatihan yang harus dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang dirasakan perlu dan mendesak oleh suatu lembaga/instansi. Apabila proses penentuan kebutuhan pelatihan dilakukan dengan cermat dan detail, maka program pelatihan akan berjalan dengan baik dan tujuan pelatihan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Analisis kebutuhan pelatihan direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh sejumlah data atau informasi tentang kondisi dan kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Analisis kebutuhan membantu organisasi maupun individu dalam mencari solusi masalah untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara menyeluruh.

Sudjana (2004: 89) mengemukakan bahwa "...Analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan haruslah melibatkan tiga kegiatan analisis yaitu analisis organisasi, analisis kinerja dan analisis individu". Berdasarkan pernyataan tersebut bermakna bahwa analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan haruslah melibatkan ketiga kegiatan analisis tersebut. Namun kebanyakan lembaga diklat belum melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara komprehensif, terlihat dari kurangnya minat peserta untuk mengikuti diklat, sehingga berdampak pada sedikitnya jumlah peserta yang ikut program pelatihan, bahkan setiap kegiatan pelatihan selalu kekurangan peserta. Ini menjadi catatan bagi lembaga/instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan supaya kegiatan analisis kebutuhan dijadikan rujukan bahkan patokan bagi penyelenggara dalam menyusun dan melaksanakan program pelatihan, sehingga program pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), yang berada di Jl. Panorama 1 Lembang Bandung merupakan salah satu lembaga penyelenggara diklat. BBPPKS Bandung adalah unit pelaksana teknis kediklatan Kementerian Sosial yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi tenaga bagi kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat, pengkajian dan penyiapan standarisasi pelatihan dan pendidikan, pemberian informasi

serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu lembaga khusus diklat tentunya telah memiliki manajemen pengelolaan diklat yang baik dan terarah, sehingga dalam penyelenggaraannya, program diklat di BBPPKS telah menggunakan analisis kebutuhan pelatihan sebagai langkah awal perencanaannya. Istilah yang digunakan yaitu *Training Need Analysis* (TNA). TNA pada lembaga diklat BBPPKS dilakukan oleh staf di Bidang Program dan Evaluasi, khususnya Kasi Penyusunan Diklat.

TNA di lembaga diklat BBPPKS merupakan langkah awal yang dilakukan para perencana untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang akan diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS).

TNA yang telah dilakukan oleh BBPPKS pada tahun 2011 yaitu TNA bagi beberapa kabupaten tertinggal di enam wilayah kerjanya, yaitu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kegiatan TNA bagi Kabupaten Tertinggal Wilayah Kerja BBPPKS Bandung ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kebutuhan pengembangan kompetensi SDM kesejahteraan sosial pada daerah atau kabupaten (desa) tertinggal di wilayah kerja BBPPKS

Bandung. Sedangkan, secara khusus, TNA yang dilakukan ialah bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang berbagai jenis kegiatan dan program-program peningkatan kompetensi SDM kesos yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah atau kabupaten (desa) tertinggal serta memperoleh hasil analisis dan rumusan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM kesejahteraan sosial (kesos) di daerah atau kabupaten (desa) tertinggal.

Daerah tertinggal merupakan daerah atau kabupaten yang relatif kurang berkembang dan berpenduduk relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan kriteria Daerah Tertinggal berdasarkan standar dari lembaga BBPPKS dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, SDM, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerahnya. Beberapa faktor penyebab suatu daerah atau kabupaten dikategorikan sebagai daerah atau kabupaten tertinggal ialah sebagai berikut:

1. Faktor Geografis

Secara geografis umumnya relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan (pegunungan), kepulauan, pesisir, daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil atau karena geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan, baik transportasi maupun media komunikasi.

2. SDA (Sumber Daya Alam)

Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki sumber daya alam, atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar tetapi lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi (tidak dapat dieksploitasi), atau daerah menjadi tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan relatif rendah serta kelembagaan-kelembagaan lokal yang belum berkembang.

4. Prasarana dan Sarana

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan akses pelayanan lainnya yang menyebabkan di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas sosial dan ekonomi.

5. Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial

Seringnya frekuensi suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial ekonomi sehingga mengakibatkan suatu daerah menjadi daerah tertinggal.

6. Kebijakan Pembangunan

Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan pembangunan yang tidak tepat, seperti kurang

memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan serta tidak dilibatkannya kelembagaan-kelembagaan lokal dalam perencanaan pembangunan.

TNA bagi kabupaten tertinggal wilayah kerja BBPPKS Bandung ini dilaksanakan secara sampel terhadap daerah atau kabupaten (desa) tertinggal pada wilayah Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Garut dan Sukabumi), Propinsi Banten (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), Propinsi Lampung (Kabupaten Waykanan), Propinsi Kep. Bangka Belitung (Kabupaten Belitung dan Belitung Timur) serta Propinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Bengkayang dan Landak). Dari beberapa daerah tersebut, Peneliti mengambil salah satu sampel yang dijadikan penelitian ialah hasil TNA pada diklat di kabupaten Garut, yakni dengan diselenggarakannya Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dari 183 Kabupaten di seluruh Indonesia yang masih tercatat sebagai daerah tertinggal. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Garut (2007) Jumlah desa/ kelurahan yang ada di kabupaten Garut 424 desa/ kelurahan, diantaranya 168 masuk kategori desa tertinggal dan 39 desa sangat tertinggal. (*sumber: Laporan TNA BBPPKS Bandung*)

Jika ditilik dari kondisi geografis, Kabupaten Garut merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan. Kondisi demikian mengakibatkan daerah-daerah tertinggal

atau terpencil sulit dijangkau, baik transportasi maupun telekomunikasi. Selain itu, kawasan tersebut sangat peka terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, banjir, dan lain-lain. Belum lagi kondisi Indeks, sedangkan Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut saat ini menempati urutan ketiga dari bawah di tingkat Jawa Barat Rendahnya pencapaian IPM menggambarkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masih menghadapi tantangan yang cukup berat.

Berdasarkan kondisi tersebut kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang mendapatkan prioritas dalam program percepatan penanganan daerah tertinggal, salah satunya di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota. Untuk itu sebagai bagian dari lembaga yang mempersiapkan SDM pembangunan kesejahteraan sosial dalam program percepatan penanganan daerah tertinggal, BBPPKS Bandung telah melaksanakan Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera di kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 sampai dengan 30 November 2011. Diklat ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung Nomor : 1752.KPA/BBPPKS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2010, yang diikuti yang diikuti oleh 30 orang peserta, terdiri dari Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tokoh masyarakat dan aparatur desa dari Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota Kab. Garut Provinsi Jawa Barat.

Goal (tujuan) dari kegiatan diklat ini pada hakikatnya adalah pembentukan dan pengembangan Rumah Sosial yang dapat memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial secara terintegrasi kepada PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya Program Desa Sejahtera melibatkan pendamping sebagai agen perubahan yang mendampingi Rumah Sosial yang memberikan pelayanan sosial berupa bantuan desa sejahtera (BDS) yang terdiri atas bantuan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial, baik kepada PSKS dan PMKS. Bantuan desa sejahtera diberikan kepada PMKS dan PSKS dengan syarat mereka mengikuti secara aktif program-program yang dikembangkan secara partisipatif dalam Rumah Sosial yang difasilitasi oleh pendamping.

Alumni Peserta diklat ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi pendamping sosial desa sejahtera dengan menjadi pengurus rumah sosial dan dapat menjadi agen perubah di lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga apabila setelah mengikuti diklat, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan dari peserta. Dari hasil observasi, setelah penyelenggaraan diklat terbentuk sebuah rumah sosial beserta struktur kepengurusan yang rapi. Seluruh pengurus merupakan para alumni peserta diklat yang memiliki kompetensi serta kemampuan yang baik dalam menyelenggarakan program-program di Rumah Sosial. Sehingga

dapat dikatakan bahwa Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera menghasilkan memberikan dampak positif bagi *output* nya.

TNA yang telah dilakukan di lembaga BBPPKS Bandung secara matang dan dirancang sesuai prosedur yang ada tidak sepenuhnya dapat terealisasi karena beberapa hambatan termasuk adanya intervensi dari Kemensos RI yang tidak sejalan dengan kebijakan internal (lembaga) sehingga pelaksanaan tidak sepenuhnya atas dasar hasil identifikasi dan analisis atas dasar kepentingan lembaga, maka hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang harus dibahas secara komprehensif khususnya oleh pihak lembaga dan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa terpanggil untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan hasil analisis kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*) yang dilakukan dalam perencanaan program Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera daerah tertinggal di Kabupaten Garut, terutama dalam mendukung kualitas alumni diklat tersebut.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu:

- a. Lembaga diklat BBPPKS belum melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara komprehensif. Dari hasil observasi yang dilakukan Peneliti, hal ini terlihat dari kegiatan analisis kebutuhan tidak

sepenuhnya dijadikan rujukan bahkan patokan bagi penyelenggara dalam menyusun dan melaksanakan program pelatihan, sehingga terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pada kenyataannya di lapangan, TNA yang dilakukan oleh lembaga BBPPKS dalam perencanaan program diklat bagi kabupaten tertinggal di wilayah kerja BBPPKS Bandung belum terealisasi sepenuhnya karena beberapa hambatan termasuk adanya intervensi dari Kemensos RI yang tidak sejalan dengan kebijakan internal (lembaga) sehingga pelaksanaan tidak sepenuhnya atas dasar hasil identifikasi dan analisis atas dasar kepentingan lembaga.

- b. Dari hasil studi dokumentasi yang Peneliti lakukan, TNA yang telah dilakukan di BBPPKS Bandung dalam waktu terdekat ialah TNA bagi kabupaten tertinggal di wilayah kerja BBPPKS Bandung tahun 2011; yang menghasilkan data dan informasi tentang berbagai jenis kegiatan dan program-program peningkatan kompetensi SDM kesos yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah atau kabupaten (desa) tertinggal serta memperoleh hasil analisis dan rumusan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM kesos di daerah atau kabupaten (desa) tertinggal. Salah satu dari hasil tersebut ialah terselenggaranya Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut. Setelah penyelenggaraan diklat tersebut, terbentuk sebuah rumah sosial beserta struktur kepengurusan yang rapi. Seluruh

pengurus merupakan para alumni peserta diklat yang memiliki kompetensi serta kemampuan yang baik dalam menyelenggarakan program-program di Rumah Sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera memberikan dampak positif menghasilkan *output* yang baik.

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya ialah sebagai berikut: “*Bagaimana penerapan hasil TNA BBPPKS Bandung dalam mendukung kualitas alumni Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera daerah tertinggal di Kabupaten Garut?*”. Dari rumusan ini Peneliti menguraikan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana hasil TNA yang telah dilakukan BBPPKS Bandung untuk penyelenggaraan Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera daerah tertinggal di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil TNA tersebut?
3. Bagaimana penerapan hasil TNA dalam mendukung kualitas alumni Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil TNA yang telah dilakukan BBPPKS Bandung untuk penyelenggaraan Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera daerah tertinggal di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil TNA tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hasil TNA dalam mendukung kualitas alumni Diklat Pendampingan Sosial Desa Sejahtera Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pendidikan luar sekolah, khususnya mengenai salah satu satuannya, yaitu pelatihan, dan lebih jauh lagi mengenai salah satu fungsi dari manajemen pelatihan yakni perencanaan dalam program pelatihan.

2. Manfaat Praktis (Operasional)

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pola pikir peneliti khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam konteks Pendidikan Luar Sekolah.

b. Bagi Pihak Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pengelola lembaga untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan melalui manajemen yang baik.

c. Bagi Dunia Pendidikan Pada Umumnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber inspirasi untuk lebih memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan pelatihan sebagai satuan Pendidikan Luar Sekolah.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi dari skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini membahas Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, membahas Konsep Pelatihan, Konsep *Training Need Analysis* (TNA), dan Konsep Pendampingan Sosial.

BAB III : METODE PENELITIAN, bab ini membahas Lokasi dan Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Teknik Pengumpulan Data, Penyusunan Alat Pengumpul Data, Langkah-langkah Pengumpulan Data, dan Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi temuan-temuan hasil penelitian yang berkenaan dengan fokus yang diteliti, dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini membahas Kesimpulan dan Saran.

